



**KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DENGAN UNIVERSITAS JEMBER DALAM  
PROGRAM BANYUWANGI CERDAS**

*Government Partnership Of Banyuwangi Regency With University Of Jember In  
Banyuwangi Cerdas Programe*

**SKRIPSI**

Oleh

**Wijayanti  
NIM 100910201007**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DENGAN UNIVERSITAS JEMBER DALAM  
PROGRAM BANYUWANGI CERDAS**

*(Government Partnership Of Banyuwangi Regency With University Of Jember In  
Banyuwangi Cerdas Programe)*

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Wijayanti  
NIM 100910201007**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:*

- 1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Sukamdi dan Ibunda Triningsih tercinta atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian, dukungan dan kepercayaan penuh serta nasihat-nasihat selama ini;*
- 2. Adikku Triwulan Sari yang telah memberikan keceriaan dan kebahagiaan dalam keluarga, serta kedewasaannya yang selalu memotivasi kakak untuk terus maju;*
- 3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;*
- 4. Sahabat – Sahabatku yang selalu ada dan tiada bosannya mengingatkan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan karya tulis ini;*
- 5. Almamaterku tercinta, Administrasi Negara FISIP Universitas Jember.*

**MOTTO**

“Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai”<sup>1</sup>

**(Schopenhauer)**

*“Always be yourself no matter what they say and never be anyone else even if they look better than you”<sup>2</sup>*

**(SBI)**

---

<sup>1</sup> <http://fredrikharvestblogspot.co.id/2013/03/kumpulan-motto-hidup.html?m=1>

<sup>2</sup> <http://www.sekolahbahasainggris.com/contact-us>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wijayanti

NIM : 100910201007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *Kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Jember dalam Program Banyuwangi Cerdas* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan instansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 November 2015

Yang menyatakan,

Wijayanti

NIM. 100910201007

**SKRIPSI**

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DENGAN UNIVERSITAS JEMBER DALAM PROGRAM BANYUWANGI  
CERDAS**

Oleh

**Wijayanti  
NIM 100910201007**

**Pembimbing**

**Dosen Pembimbing Utama : Drs. Boedijono, M.Si**

**Dosen Pembimbing Anggota : Hermanto Rohman, S.Sos,MPA**

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “Kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Jember Dalam Program Banyuwangi Cerdas” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Senin, 09 November 2015

tempat : Ruang Ujian Skripsi AN Lt II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP 195808101987021002

Drs. Boedijono, M.Si  
NIP 196103311989021001

**Anggota Tim Penguji**

1. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA ( )  
NIP 197903032005011001
2. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si ( )  
NIP 195805101987022001

**Mengesahkan**

**Dekan**

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA  
NIP 195207271981031003

## RINGKASAN

**Kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Dengan Universitas Jember Dalam Program Banyuwangi Cerdas;** Wijayanti, 100910201007; 2015: 80 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Program Banyuwangi Cerdas adalah program yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bertujuan membantu peserta didik dan mahasiswa, yang tidak mampu, agar dapat melanjutkan pendidikannya. Melalui program Banyuwangi Cerdas ini diharapkan peserta didik dari keluarga yang tidak mampu dapat melanjutkan pendidikannya. Harapannya putra terbaik Kabupaten Banyuwangi, dari keluarga tidak mampu, dapat membangun Banyuwangi menjadi lebih baik.

Universitas Jember merupakan satu - satunya perguruan tinggi negeri di 6 (enam) kabupaten / kota wilayah besuki raya yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Probolinggo berdasarkan panduan sbmptbr2015. Dan menjadi salah satu perguruan tinggi yang bermitra dengan pemerintah kabupaten Banyuwangi di bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian, pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan penerapan ipteks dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui resource sharing SDM yang dimiliki oleh masing – masing pihak. Jadi seharusnya universitas jember mampu mengawal upaya pemerintah daerah dan bersinergis untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah Tapal Kuda. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan terkait kemitraan pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Jember dalam program Banyuwangi cerdas.

Peneliti menggunakan penelitian Kualitatif deskriptif. Dengan melakukan wawancara terhadap informan yang ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk penentuan *key informan*, sedangkan untuk menentukan orang yang menjadi informan berikutnya menggunakan teknik *Snowball*. Data-data yang

diperoleh peneliti kemudian diolah dan dianalisis sebagai hasil dari penelitian. Peneliti menggunakan analisis data model interaktif Berdasarkan Miles dan Huberman yaitu melalui dengan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, model data, serta penarikan/verifikasi kesimpulan.

Hasil yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa Melihat dari mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi Program Banyuwangi Cerdas yang merupakan bentuk suatu kerja sama antara Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Jember, memiliki karakteristik tersendiri, sehingga aktivitas kerjasama yang disebut sebagai kemitraan termasuk dalam *intergovernmental networks* dimana dalam proses *intergovernmental networks*, perlu interaksi diantara daerah sebagai anggota forum kerjasama antar pemerintah daerah dan menekankan pada dimensi *collective action* (tidak ada actor tunggal) dimana dengan *collective action* tersebut, tujuan dinegoisasikan, budaya digali, pemahaman bersama didorong dan kompromi dibuat diantara daerah-daerah yang tergabung dalam sebuah forum kerjasama antar pemerintah daerah. Kemudian juga sesuai dengan teori kemitraan model *mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik oleh Sulistyani (dalam Kusumadewi, 2012) yang merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu untuk saling memberikan manfaat lebih sehingga tercapai tujuan secara optimal. Manfaat dari masing – masing pihak antara pemda Banyuwangi dengan Universitas Jember dengan *resource sharing* sumber daya manusia.

**Kata Kunci** : program, kemitraan, pemerintah daerah, *intergovernmental network*

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Jember Dalam Program Banyuwangi Cerdas”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edi Wahyudi, S.Sos, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Dr. Anastasia Murdyastuti M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama, Hermanto Rohman S.Sos,MPA, selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran untuk peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis berstatus sebagai Mahasiswa.
6. Seluruh dosen beserta segenap Staf Edukatif dan Administratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Sumiati S.Sos, selaku Kasubag Penyusunan program Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang membantu dalam penyelesaian karya tulis ini.

8. Bapak Suratno, selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang telah membantu memberikan informasi demi kesempurnaan skripsi penulis.
9. Bapak Sabar selaku staf BAAK Universitas Jember yang telah membantu memberikan informasi demi kesempurnaan skripsi penulis.
10. Bapak Suprpto,S.H selaku staf kemahasiswaan Universitas Jember yang telah membantu memberikan informasi demi kesempurnaan skripsi penulis.
11. Ahmad Rizqi Andi selaku mahasiswa penerima beasiswa Program Banyuwangi Cerdas Universitas Jember yang telah membantu memberikan informasi demi kesempurnaan skripsi penulis.
12. Seluruh pihak yang berpartisipasi dalam membantu penyelesaian karya tulis ini.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun kami harap dari segenap pihak. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua budi baik yang diberikan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.Aamiin.

Jember, 09 November 2015

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat</b> .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
<b>2.2 <i>New Public Governance</i></b> .....	11
2.2.1 Perkembangan Paradigma Ilmu Administrasi Negara .....	11
2.2.2 Pengertian <i>New Public Governance</i> .....	12
<b>2.3 <i>Intergovernmental Networks</i></b> .....	17
2.3.1 Beberapa Faktor pendukung kerjasama pemerintah daerah	19
2.3.2 Efektivitas kerjasama antar pemerintah daerah.....	19

2.3.3	Alternatif Kerangka Regulasi Kerjasama Antar pemerintah daerah .....	22
<b>2.4</b>	<b>Kemitraan .....</b>	<b>23</b>
2.3.1	Pengertian Kemitraan .....	23
2.3.2	Prinsip Kemitraan.....	24
2.3.3	Langkah – langkah kemitraan .....	25
2.3.4	Ruang Lingkup Kemitraan .....	26
2.3.5	Model-model kemitraan dan jenis kemitraan .....	27
<b>2.5</b>	<b>Program Banyuwangi Cerdas .....</b>	<b>30</b>
<b>2.6</b>	<b>Institut Perguruan Tinggi.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB 3.</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
<b>3.1</b>	<b>Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>36</b>
<b>3.2</b>	<b>Objek Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>3.3</b>	<b>Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>37</b>
<b>3.4</b>	<b>Sumber dan Jenis Data .....</b>	<b>37</b>
<b>3.5</b>	<b>Informan Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>3.6</b>	<b>Teknik dan Alat Perolehan Data .....</b>	<b>41</b>
<b>3.7</b>	<b>Teknik Penyajian dan Analisis Data .....</b>	<b>44</b>
<b>3.8</b>	<b>Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB 4.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
<b>4.1</b>	<b>Gambaran Umum Daerah Penelitian.....</b>	<b>51</b>
4.1.1	Sejarah Kabupaten Banyuwangi .....	51
4.1.2	Profil Kabupaten Banyuwangi .....	52
4.1.3	Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi.....	53
4.1.4	Sejarah Universitas Jember .....	55
4.1.5	Visi dan Misi Universitas Jember .....	56
<b>4.2</b>	<b>Program Banyuwangi Cerdas .....</b>	<b>56</b>
4.2.1	Pelaksanaan Program Banyuwangi Cerdas .....	58

<b>4.3 Kemitraan Banyuwangi dengan Universitas Jember .....</b>	<b>64</b>
4.3.1 Proses Kemitraan.....	65
4.3.2 Proses Pelaksanaan Kemitraan.....	68
4.3.3 Kendala dalam pelaksanaan .....	70
4.3.4 Pencapaian.....	75
<b>4.4 Pembahasan .....</b>	<b>76</b>
<b>BAB 5. PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>90</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>90</b>
5.2.1 Saran Untuk Kabupaten Banyuwangi .....	91
5.2.2 Saran Untuk Universitas Jember .....	91
5.2.3 Saran Untuk mahasiswa penerima program.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>LAMPIRAN A. PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN B. TRANSKIP WAWANCARA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN C. DOKUMENTASI FOTO.....</b>	<b>107</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel	halaman
1.1 Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2011-2013.....	3
2.1 Tujuh Definisi tentang <i>Governance</i> .....	14
3.1 Indeks Pembangunan Manusia se Karesidenan Besuki 2006-2012 .....	37
3.2 Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	47
4.1 Tugas Pelaksana Program Banyuwangi Cerdas Tingkat Pendidikan Tinggi.....	60
4.2 Daftar Jumlah Penerima Program Banyuwangi Cerdas Universitas Jember Tiap Angkatan .....	63
4.3 Tahapan Proses Penerimaan Calon Mahasiswa dan Peranan Masing-masing Pihak .....	68
4.4 Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa PBC Universitas Jember .....	71
4.5 Biaya Hidup Penerima Beasiswa PBC Universitas Jember .....	71
4.6 Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa PBC Universitas Jember .....	71
4.7 Biaya Hidup Penerima Beasiswa PBC Universitas Jember .....	72

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	halaman
1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 .....	6
2.1 Diagram Ruang Lingkup Kemitraan .....	26
3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman .....	45
4.1 Proses Seleksi Penerima Program Banyuwangi Cerdas .....	62
4.2 Proses Kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Jember.....	65
4.3 Tata Cara Pelaksanaan Program Banyuwangi Cerdas.....	69
4.4 Alur Pencairan Dana Program Banyuwangi Cerdas.....	74

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
<b>LAMPIRAN A. PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	85
<b>LAMPIRAN B. TRANSKIP WAWANCARA .....</b>	86
<b>LAMPIRAN C. DOKUMENTASI FOTO .....</b>	95
Gambar C1. Proses seleksi mahasiswa calon penerima beasiswa .....	95
Gambar C2. Proses Verifikasi lapangan .....	95
Gambar C3. Contoh kondisi rumah mahasiswa lolos seleksi program banyuwangi cerdas .....	96
Gambar C4. Penndatangan piagam kerjasama Universitas Jember dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.....	96
Gambar C5. Piagam Kesepakatan Bersama antara Universitas Jember dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.....	97
Gambar C6. Peraturan Bupati Banyuwangi No 15 Tahun 2013 .....	99
Gambae C7.Standar Operasional Prosedur Program Banyuwangi Cerdas.....	106
Gambar C8. Daftar Penerima Program Banyuwangi Cerdas Universitas Jember .....	107
Gambar C9. Pedoman Pelaksanaan Program Banyuwangi Cerdas.....	111
Gambar C10. Surat Tugas Pembimbing.....	136
Gambar C11. Blanko Daftar Nilai.....	137
Gambar C12. Surat ijin penelitian dari lembaga penelitian UNEJ.....	138
Gambar C13. Ijin penelitian FISIP UNEJ .....	139
Gambar C14. Ijin penelitian dari Bakesbangpol Banyuwangi .....	140
Gambar C15. Ijin penelitian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi .....	141
Gambar C16. Nilai Seminar .....	142

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemitraan pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Jember dalam program Banyuwangi cerdas. Upaya pemerintah meningkatkan derajat pendidikan dengan berbagai hal, adanya undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara eksplisit pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pendidikan merupakan hak yang dimiliki setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kepada pemerintah Indonesia untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Secara detail, dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab I Pasal ayat(1) Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan bangsa. Dalam hal ini, tentu saja diperlukan adanya pendidik yang profesional terutama guru di sekolah-sekolah dasar dan menengah dan dosen di perguruan-perguruan tinggi.

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan sepanjang hayat untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, yang merupakan hak setiap

warga Negara. Berbagai permasalahan ekonomi muncul seiring dengan semakin sulitnya pemenuhan ekonomi keluarga termasuk biaya pendidikan. Pemenuhan biaya pendidikan merupakan suatu hal utama dalam kehidupan karena pendidikan dapat meningkatkan derajat hidup manusia. (pedoman pelaksanaan program banyuwangi cerdas,2013:4)

Seperti yang diutarakan oleh wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional bahwa 80% menyatakan putus sekolah karena kesulitan ekonomi baik yang tidak punya dana untuk beli pakaian seragam, buku, transport atau kesulitan ekonomi yang mengharuskan mereka harus bekerja sehingga tidak mungkin bersekolah. Sulitnya untuk bersekolah bagi anak Indonesia bukan disebabkan oleh ketidakinginan siswa untuk belajar, tetapi lebih kepada ketidakmampuan orang tua untuk membiayai sekolah. Terlebih lagi biaya untuk sekolah tidak hanya terpaku pada biaya iuran rutin, tapi juga kebutuhan akan alat tulis dan sebagainya. Dari distribusi nasional sebanyak 15,78% penduduk tanah air berada di Provinsi Jawa Timur. Jumlah penduduk Jawa Timur hampir 37,48 juta jiwa. Sebanyak 5,63 juta jiwa merupakan penduduk usia sekolah. Namun di Jawa Timur dari data yang ada masih terdapat 47.292 orang anak yang tidak dan belum pernah sekolah di usia sekolah serta lebih dari 221.000 lainnya tidak melanjutkan sekolah dengan berbagai alasan. Kemiskinan di beberapa daerah tidak hanya di Jawa Timur menjadi faktor penyebab putus sekolah lebih dari 70%. Di Jawa Timur, menurut data sosial ekonomi April 2011, jumlah penduduk miskin mencapai 5,53 juta jiwa atau sekitar 15,26%. (<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/12/25/154298-80-persen-anak-indonesia-putus-sekolah-karena-ekonomi>)

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Banyuwangi tahun 2009 mencatat angka rata – rata penduduk umur  $\geq 15$  tahun di kabupaten Banyuwangi tercatat selama 6,73 tahun atau rata – rata lamanya penduduk kabupaten Banyuwangi dalam menjalani pendidikan selama 6 tahun 9 bulan yang setara dengan kelas I (satu) SMP sederajat. Dibanding dengan rata – rata lama sekolah tahun 2008 tahun 2009 tampak ada penurunan, akibat dari penurunan angka ini bukan berarti program

pembangunan di bidang pendidikan mengalami kemunduran, namun sebagai akibat dari kelambatan dalam mengupayakan tingkat capaian dari program pembangunan di bidang pendidikan itu sendiri.

Tabel 1.2 Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan 2011-2013

<b>Jenjang pendidikan</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum pernah sekolah	8.92	6.47	6.40
Tidak/Belum Tamat SD/MI	25.05	24.54	26.38
SD/MI	28.71	29.11	28.60
SLTP sederajat	19.78	18.87	17.82
SMA sederajat	14.45	16.20	17.50
Perguruan Tinggi	3.10	4.81	3.30

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi tahun 2014

Dengan memperhatikan rendahnya persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan 2011-2013 kabupaten banyuwangi tersebut, maka membawa dampak yang serius terhadap kehidupan social ekonomi. Seperti terhadap kualitas pekerja dan pengangguraan. Untuk kualitas pekerja dengan rata – rata pendidikan yang relatif rendah tentu akan mempengaruhi nilai jual pekerja itu sendiri, sedang untuk kualitas pengangguran dengan tingkat pendidikan yang relative rendah akan menyusahkan mereka dalam memperoleh kesempatan kerja yang pada umumnya diperebutkan dengan kompetiter lain, kalau sudah demikian maka ketinggian pembangunan manusia bidang pendidikan di Kabupaten Banyuwangi akan menjadi lebih serius.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memandang perlu untuk mencetuskan program yang dapat membantu generasi muda Kabupaten Banyuwangi untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih mudah tanpa memikirkan biaya pendidikan dari jenjang SD sampai perguruan tinggi. Program tersebut adalah Program Banyuwangi Cerdas (PBC). Program ini digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bertujuan membantu peserta didik dan mahasiswa, yang tidak mampu, agar dapat melanjutkan pendidikannya. Melalui

program Banyuwangi Cerdas ini diharapkan peserta didik dari keluarga yang tidak mampu dapat melanjutkan pendidikannya. Harapannya putra terbaik Kabupaten Banyuwangi, dari keluarga tidak mampu, dapat membangun Banyuwangi menjadi lebih baik.

Program Banyuwangi cerdas berfungsi membekali peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah agar dapat menuntaskan pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah bahkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kerangka program Banyuwangi Cerdas diimplementasikan melalui penerbitan Kartu Banyuwangi Cerdas dan Kartu Banyuwangi Belajar. Dua kartu itu berfungsi sebagai jaminan kelangsungan belajar siswa mulai sekolah dasar hingga mahasiswa, khususnya bagi anak yang kurang mampu. Kartu Banyuwangi Cerdas diberikan kepada mahasiswa tidak mampu berprestasi dan mahasiswa berprestasi. Adapun Kartu Banyuwangi Belajar ditujukan bagi siswa tidak mampu SD hingga SMA. Program ini menysasar 5.000 siswa jenjang SD yang kurang mampu, 2.500 siswa jenjang SMP, dan 750 siswa jenjang SMA. Untuk mahasiswa, sedikitnya 150 mahasiswa berprestasi dan tidak mampu dibiayai dari program ini. Pemegang Kartu Banyuwangi Belajar akan mendapatkan fasilitas biaya pendidikan, mulai dari buku, bimbingan belajar, hingga kebutuhan personal lainnya. Adapun untuk Kartu Banyuwangi Cerdas, para pemegangnya akan mendapat bantuan dalam bentuk uang tunai setiap bulan.

Pendanaan Kartu Banyuwangi Cerdas ini diperoleh dari Bantuan Administrasi Sekolah (BAS) Rp 2,6 miliar. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP Negeri/Swasta Rp114 miliar, dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA/SMK Negeri/Swasta Rp 10,2 miliar. Selain itu, masih ada sumber pendanaan lain berupa program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang pada 2012 telah berhasil menghimpun dana Rp 1,2 miliar.

Tidak hanya di jenjang SD-SMA/ sederajat, mahasiswa asal Banyuwangi juga didampingi hingga bisa meraih gelar sarjana. Pendidikan tinggi dinilai sangat penting karena berdasarkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia,

yaitu “mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan” maka salah satu faktor terpenting yang perlu disiapkan secara terencana dan sungguh-sungguh adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM terampil dan mandiri, yang mampu memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan yang muncul dalam berbagai bidang kegiatan pembangunan. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Agus Salim (2012) mengungkapkan bahwa sebagian besar SDM yang dimiliki Indonesia saat ini adalah lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang lulusan perguruan tinggi.

Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 58, menegaskan bahwa Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi adalah sebagai: (1) wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat; (2) wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; (3) pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan (5) pusat pengembangan peradaban bangsa.

Dengan fungsi dan peran tersebut maka lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia adalah sentra pembangunan SDM. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan SDM Indonesia ditentukan oleh mutu perguruan tinggi di negeri ini. Tidak juga berlebihan apabila bangsa Indonesia sangat berharap pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk dapat melahirkan generasi yang terampil dan mandiri. Profil para lulusan perguruan tinggi di Indonesia akan menentukan daya saing bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika persaingan global. Era globalisasi membutuhkan SDM yang tidak hanya pandai memanfaatkan peluang, tetapi juga mampu menciptakan peluang, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Banyuwangi yang membutuhkan pekerjaan ada sekitar 70,37 persen yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 44,79 persen dan perempuan 25,58 persen.

Sedang selebihnya yang sebanyak 29,63 persen merupakan akumulasi dari jumlah penduduk yang sedang bersekolah, mengurus rumahtangga dan mereka yang melakukan kegiatan lain seperti hanya melakukan olahraga dan sejenisnya.

Ternyata tingkat pengangguran erat kaitannya dengan tingkat pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikannya, menurut Suryo (2012), dari 8,14 juta pengangguran terbuka, 20 persen berpendidikan SD, 22,6 persen tamatan SMP, 40,07 persen tamatan SLTA, 4 persen tamatan diploma, sedangkan 5,7 persen tamatan sarjana". Berkaitan dengan sangat pentingnya pendidikan tinggi maka pada tahun ini (2013), Pemkab Banyuwangi menjamin mahasiswa tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri (PTN). Dana sebesar Rp 600 juta disiapkan untuk 50 orang mahasiswa berprestasi dan tidak mampu bisa kuliah di PTN yang diajak bermitra, yaitu Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Universitas Jember (Unej), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember.

Kerjasama yang berbasis kemitraan ini dirasa sangat penting oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi karena mengingat Banyuwangi kaya akan sumber daya alam, namun kekayaan alam tersebut tidak akan mampu dikelola dengan baik jika kualitas sumber daya-nya tidak terdidik. Melalui program Banyuwangi cerdas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi calon mahasiswa yang kurang mampu akan tetapi memiliki prestasi dibidang akademik untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Mengingat Pemkab tidak dapat berjalan sendiri untuk itu pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjalin kemitraan. Kemitraan Menurut Notoatmodjo (2003), adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengirimkan siswa – siswi berprestasi namun dari kalangan tidak mampu untuk kuliah di perguruan tinggi terkait salah satunya yaitu Universitas Jember.

Universitas jember merupakan satu - satunya perguruan tinggi negeri umum di 6 (enam) kabupaten /kota wilayah besuki raya yaitu Jember, Banyuwangi,

Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Probolinggo berdasarkan panduan sbmptbr2015. Dan menjadi salah satu perguruan tinggi yang bermitra dengan pemerintah kabupaten Banyuwangi di bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian, pemberdayaan masyarakat, pengembangan dan penerapan ipteks dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui resource sharing SDM yang dimiliki oleh masing – masing pihak. Jadi seharusnya universitas jember mampu mengawal upaya pemerintah daerah dan bersinergis untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah Tapal Kuda.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan terkait kemitraan pemerintah daerah kabupaten banyuwangi dengan universitas jember dalam program banyuwangi cerdas yang sudah berjalan. Yang didasarkan pada standar yang telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Banyuwangi No 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi cerdas Kabupaten Banyuwangi serta piagam kesepakatan bersama antara universitas jember dan pemerintah kabupaten banyuwangi Nomor 2579/UN25/PS.8/2012 dan Nomor 188/4/429.011/2012 perihal komitmen untuk melakukan kerjasama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rasa ingin tahu akan mendorong seseorang untuk melakukan penelitian agar mendapatkan data yang diinginkan untuk memecahkan masalah. Masalah merupakan aspek yang harus ada dalam penelitian. Stonner (dalam Sugiyono 2002:35) mendefinisikan masalah sebagai berikut: masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi.

Secara pokok permasalahan penelitian berdasarkan dari hasil pengumpulan data sekunder yang peneliti peroleh maka penulis menggunakan jenis permasalahan deskriptif-kualitatif, dan masalah yang akan diteliti yaitu: "Bagaimana pelaksanaan

kemitraan pemerintah daerah kabupaten banyuwangi dengan universitas jember dalam program banyuwangi cerdas?”

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu gambaran atas target yang ingin dicapai oleh peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian, tujuan yang hendak dicapai tidak boleh menyimpang dari rumusan masalah penelitian agar tetap fokus dan tidak keluar dari permasalahan yang akan dikaji.

Berdasarkan pengertian tujuan penelitian tersebut, maka peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan kemitraan pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Jember dalam program Banyuwangi cerdas.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

##### **a. Akademis**

akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan bacaan, referensi kajian dan rujukan akademis dalam perspektif ilmu pengetahuan Kebijakan Publik, khususnya di bidang program pendidikan dan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi.

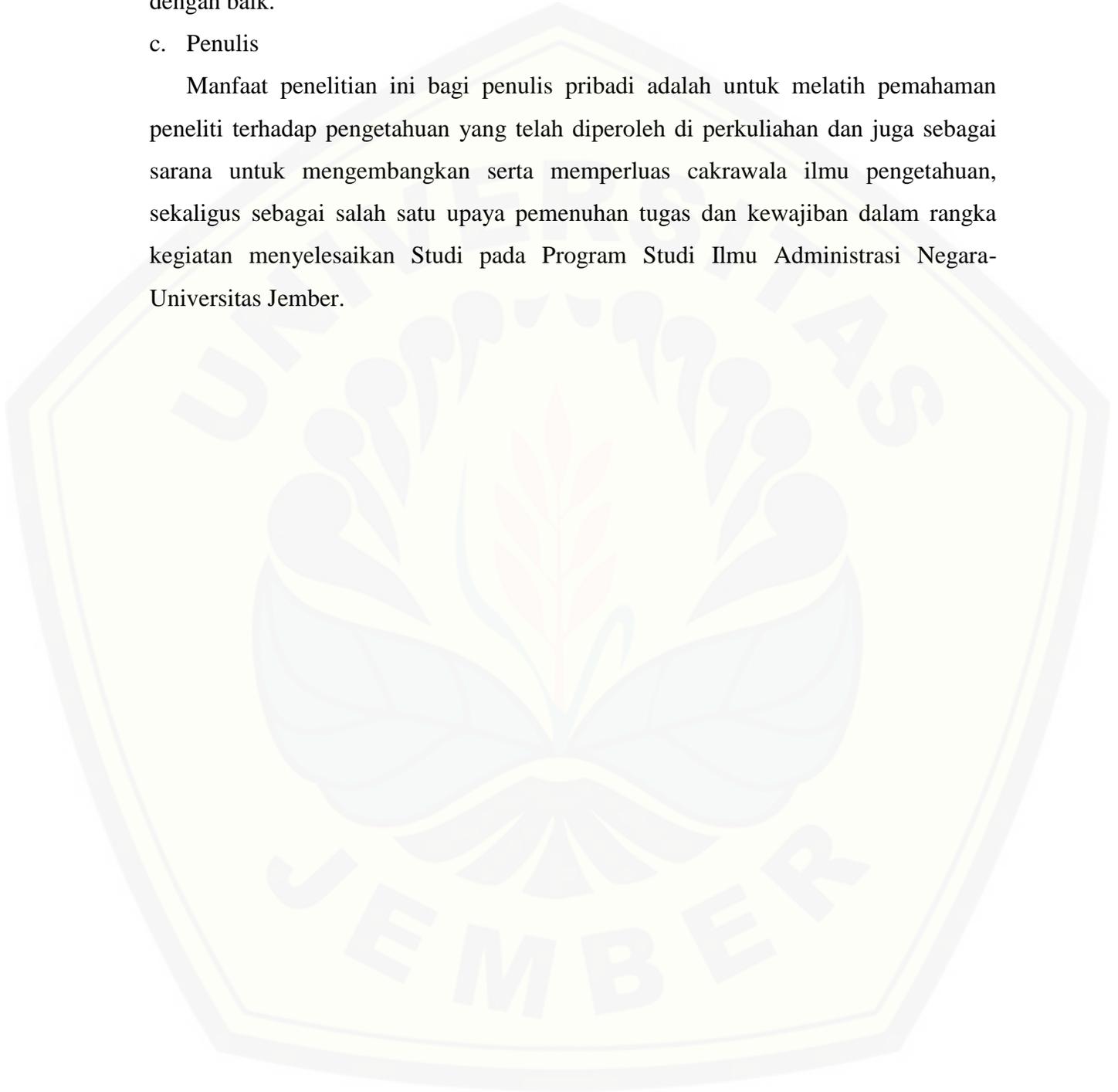
##### **b. Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pihak-pihak yang khususnya terlibat dalam upaya pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan perguruan

tinggi (Universitas Jember) sehingga diharapkan tujuan dari program akan tercapai dengan baik.

c. Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis pribadi adalah untuk melatih pemahaman peneliti terhadap pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan dan juga sebagai sarana untuk mengembangkan serta memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan Studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara-Universitas Jember.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Peranan konsep dalam penelitian sangat besar karena menghubungkan antara teori dan observasi. Dalam penelitian sosial peranan ini menjadi semakin penting karena realita sosial yang menjadi penelitian ilmu sosial banyak yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia sehingga sering timbul masalah dalam pengukuran konsep tersebut. Menurut J. Supranoto (1992:30) menyatakan bahwa konsep dasar merupakan suatu pandangan teoritis dari definisi singkat yang menjadi dasar bagi kita untuk mencapai pemecahannya dari persoalan yang perlu diteliti. Tujuannya adalah menyederhanakan pemikiran kita dengan jalan menggabungkan sejumlah peristiwa.

Berhubungan dengan konsep Singaribuan dan Effendi (1997:37) menyatakan bahwa:“ Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.” Melalui konsep ini, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan dengan yang lainnya.

Berdasarkan pada paparan diatas maka konsep-konsep yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. *New Publik Governance*
2. *Intergovernmental network*
3. Kemitraan
4. Implementasi
5. Program Banyuwangi Cerdas
6. Perguruan Tinggi

Kelima konsep dasar tersebut diharapkan mampu dijadikan sebagai gambaran umum peneliti untuk membentuk kerangka berpikir peneliti yang kemudian dapat

mempermudah peneliti untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

## **2.1 New Publik Governance**

### **2.1.1 Perkembangan Paradigma Ilmu Administrasi Negara**

Administrasi publik telah mengalami perkembangan terkait paradigma yang digunakan, mulai dari *old publik administration* (Wilson, 1887), *new publik management* (Osborne dan Gaebler, 1992), dan *new publik service* (Denhardt dan Denhardt, 2003). Paradigma *old publik administration* berkembang sejak Wilson (1887) mengembangkan pemikirannya dalam tulisan yang berjudul “*the study of administration*”. Karya Wilson menjadi fondasi berkembangnya Dikotomi politik Administrasi. Pada dasarnya dalam tulisan ini Wilson berpendapat efisiensi dan efektivitas birokrasi dapat ditingkatkan dengan mengembangkan administrasi publik yang profesional dan non partisan. Tema dominan dari pemikiran Wilson adalah aparat atau birokrasi yang netral atau terpisah dari hiruk pikuk kepentingan politik. Karena itu administrasi negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip administrasi dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang rasional dan ekonomis. Administrasi negara merupakan pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik, ini menjadi bidangnya para birokrat teknis. Sedang perumusan kebijakan merupakan wilayah politik dan menjadi bidangnya para negarawan atau politisi.

Dalam perkembangannya, menurut Keban (2008:244) paradigma *old publik administration* menghadapi berbagai masalah, seperti: 1) pola penerapan sistem birokrasi yang dianggap ideal menimbulkan sifat kaku, bertele-tele, dan *red tape* (*Weber's fallacy*); 2) administrasi publik dianggap sebagai kegiatan yang tidak bersifat politis, padahal dalam pelaksanaannya bersifat politis (*Wilson's fallacy*); dan 3) rekayasa teknologi dan ilmu pengetahuan bukan satu-satunya cara terbaik untuk melakukan tugas (*Taylor's fallacy*).

Sedangkan paradigma *new publik management* merupakan paradigma yang mengadopsi pendekatan *privat sektor* dalam memajemen usahanya ke proses administrasi pada sektor publik. Pendekatan ini menggunakan teori pilihan publik (*publik choice*) dalam pengambilan kebijakan dengan didukung profesionalisme manajer. Dalam perkembangannya, NPM menuai banyak kritik karena para elit birokrasi cenderung berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan diri dan kelompoknya daripada kepentingan umum. Di samping itu, paradigma yang didasarkan pada pilihan publik ini sangat didominasi kepentingan individu, sehingga mengabaikan konsep-konsep *publik spirit*, *publik service*, keadilan sosial, pemerataan, dan lain sebagainya (Keban, 2008:247).

Kemudian muncul paradigma *new publik service* yang berangkat dari kritik terhadap paradigma *new publik management* terutama berasal dari Denhardt & Denhardt (2003). Mereka berpendapat bahwa nilai-nilai yang melekat pada paradigma *new publik management* seperti efisiensi, rasionalisasi, produktifitas dan bisnis pada birokrasi bertentangan dengan nilai-nilai kepentingan publik dan demokrasi. Pendapat Denhardt dan Denhardt bahwa pemilik kepentingan publik hakikatnya adalah masyarakat (publik) maka administrator dalam menjalankan pemerintahan harus memusatkan pada tanggung jawab melayani warga negara. Peran melayani warga negara tersebut disebut sebagai paradigma *new publik service (NPS)*. Paradigma *new publik service* menghendaki pelibatan warga negara dalam pemerintahan baik pada tataran perencanaan sampai pada implementasi kebijakan. Administrator harus melayani masyarakat dengan bertanggung jawab, mengedepankan etika dan akuntabilitas pada setiap program atau proyek yang ditujukan pada masyarakat dalam kerangka demokrasi.

Seiring dengan perkembangannya muncul paradigma baru yaitu *New publik Governance (Good Governance)*,

### 2.1.2 Pengertian *New Publik Governance*

Secara umum *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antar pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi. *Governance* meliputi tiga

domain, yaitu *state* (Negara/pemerintahan), *privat sektor* (sektor swasta/dunia usaha) dan *society* (masyarakat).

*Governance* merupakan terminology yang digunakan menggantikan istilah *government*, yang menunjukkan penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah kenegaraan. Istilah ini secara khusus menggambarkan perubahan peranan pemerintah dari pemberi pelayanan kepada fasilitator dan perubahan kepemilikan dari milik Negara ke milik rakyat. Pusat perhatian utama *governance* adalah perbaikan kinerja dan perbaikan kualitas. *Governance* berarti proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Konsep *governance* menggambarkan adanya perubahan makna pemerintahan yang merujuk kepada a). suatu proses baru dalam memerintah, b) perubahan kondisi dalam tata aturan dan c) metode baru tentang peran serta masyarakat dalam pemerintahan (Rhodes,1996) dan salah satu pendekatannya disebut dengan *Socio cybermatics approach*. Inti dari pendekatan ini adalah bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan masyarakat dan kian kompleksnya isu yang harus segera diputuskan, beragam institusi pemerintah serta kekuatan masyarakat madani (*civil society*) yang berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan (*policy making*), maka hasil akhir (*outcome*) yang memuaskan dari kebijakan publik tidak mungkin dicapai jika hanya mengandalkan peran pemerintah. Tindakan *governance* lebih mementingkan tindakan bersama (*collective action*) dimana masing-masing aktor akan berinteraksi dan saling memberi pengaruh demi tercapainya kepentingan bersama.

Dengan beberapa konsep *governance* seperti yang tersebut diatas maka *governance* merujuk pada sebuah proses pembuatan kebijakan dan proses dimana kebijakan tersebut dilaksanakan yang melibatkan baik Negara(pemerintah), sektor privat maupun masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. *Governance* melibatkan tidak hanya Negara (pemerintah) tetapi juga sektor privat dan masyarakat madani. Kesemuanya merupakan aktor yang memiliki peran sama penting dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Negara (pemerintah)

berperandalam menciptakan situasi politik dan hukum yang kondusif, sektor privat berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan; dan masyarakat madani berperan dalam memfasilitasi interaksi secara social dan politik yang memadai bagi mobilisasi individu atau kelompok – kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas, ekonomi, politik dan social. Upaya untuk menyeimbangkan ketiga komponen diatas merupakan peran yang harus dimainkan oleh ilmu administrasi publik. Jika peran yang dimainkan tidak mampu menjamin adanya kongruensi antara ketiganya, maka akan terjadi ketidakseimbangan karena ada kemungkinan satu komponen mempengaruhi bahkan menguasai komponen lainnya.

Dalam konteks ini kenapa peneliti memasukkan konsep New Publik Government, karena kemitraan merupakan suatu cara baru di dalam memerintah. Dengan berjalannya kemitraan itu tadi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berarti telah memberikan inovasi baru terhadap masyarakat Banyuwangi di dalam memerintah. Untuk itu konsep ini juga dipakai di dalam penelitian ini. Dan untuk mendukung alasan kenapa konsep ini harus dipakai, perkembangan istilah *governance* terus mengalami perubahan dan cenderung mengalami perluasan makna. *Governance* tidak saja menjelaskan relasi-keterkaitan organisasi, tetapi juga sebagai *governance* sebagai nilai. Hal ini bisa dilihat dari tujuh definisi *governance* dari Rhodes seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 2.1 Tujuh Definisi tentang *Governance*

No	Pengertian	Deskripsi Ringkas
1	<i>Governance</i> sebagai <i>Corporate Governance</i>	Pengertian ini mengacu kepada cara perusahaan dikelola secara efisien, yang kemudian ditranslasikan ke sektor publik dalam bentuk manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Implikasi pengertian ini membawa kepada tiga prinsip dalam organisasi publik; keterbukaan atau informasi yang <i>disclosur</i> , integritas pejabat publik dan akuntabilitass setiap peran dan tindakan individu pejabat publik.
2	<i>Governance</i> sebagai <i>New Publik Management</i>	Pengertian ini memiliki dua makna, yaitu (a) penerapan manajemen korporasi dalam sektor publik dalam bentuk kinerja yang terukur,

3	<i>Governance</i> <i>Governance</i>	sebagai	<i>Good</i>	<p><i>management by result, value for money</i>, dan lebih dekat dengan pelanggan; (b) marketisasi, yaitu penerapan struktur atau pola insentif dalam penyediaan pelayanan publik melalui kontrak dengan pihak luar (ketiga), mekanisme semi pasar dan pilihan konsumen.</p> <p>Dipengaruhi oleh pemikiran reformasi pemerintahan menuju <i>good governance</i> dengan tiga strands (untalan) ; (1) sistemik; distribusi kekuasaan ekonomi dan politik secara internal dan eksternal; (2) politik; kondisi yang “menyenangkan” bagi pemerintah karena mandate demokratis (legitimasi atau otoritas); (3) Administratif, pelayanan pulik yang efisien , terbuka, akuntabel, auditable, Bank Dunia menyatakan efisiensi melalui kompetisi-tender, mekanisme pasar, privatisasi, reformasi pelayanan dan pengurangan staff, disiplin anggaran, desentralisasi administrasi, pernyak NGO. <i>Good Governance</i> yang dipasangkan dengan NPM melahirkan demokrasi liberal.</p>
4	<i>Governance</i> kesalingtergantungan internasional	sebagai		<p>Menurut pngertian ini, kesalingtergantungan akan dicapai dengan mengikis peran dan otonomi negara dengan cara internasionalisasi produksi, transaksi keuangan, internasionalisasi orgnisasi dalam bentuk hubungan langsung dengan organisasi negara, regional atau local, dan melamahkan kapasitas nation state sebagai <i>governer</i>.</p>
5	<i>Governance</i> sebagai <i>system Socia</i> <i>Cybernetic</i>			<p>Peengertian ini didasarkan pada asumsi keterbatasan aktor sentral melakukan governing dan oleh karenanya tidak ada satu pun sektor yang memiliki otoritas penuh. Pada setiap arena kebijakan banyak aktor yang terlibat, terjadi kesalingtergantungan dan shared goal. Batas-batas antara publik – privat dan voluntary menjadi blurred (kabur) karena tindakan, intervensi dan control bersifat multiple. Pada odel ini terjadi kehidupan masyarakat menjadi centreless society dan system pemerintahan menjadi polycentric state. Dalam polycentic state, tugas pemerintah adalah memberdayakan interaksi sosial politik, mendorong tumbuhnya variasi aransemen dalam menanggulangi masalah dan distribusi pelayanan dengan cara; regulasi mandiri atau</p>

---

6	<i>Governance</i> sebagai ekonomi politik baru	bersama, kemitraan publik privat, joint management dan entrepreneurial venture. Menurut pengertian ini, <i>governance</i> adalah suatu proses politik dan ekonomi untuk mengoordinasikan aktivitas-aktivitas aktor-aktor ekonomi dalam bentuk transformasi kelembagaan yang mengatur aktivitas ekonomi dalam bentuk aransemen atau aransemen ulang mekanisme <i>governance</i> apakah melalui pasar, hirarki, obligational network, monitoring, promotional networks, asosiasi buat peran pemerintah sebagai gate keeper dan fasilitator.
7	<i>Governance</i> sebagai <i>Networks</i>	Menurut pengertian ini <i>governance</i> adalah institusi dan aktor yang berasal dari dan juga tidak sekadar dari pemerintah karena batas-batas tanggung jawab pemerintah dalam menangani isu sosial dan ekonomi menjadi kabur, sebagai institusi bergantung satu dengan lainnya dan tidak adanya otoritas komando pemerintah. <i>Networks</i> adalah bentuk umum dari koordinasi sosial dan pola keterkaitan organisasional di sektor privat atau publik dan sebagai mekanisme untuk mengkoordinasi dan mengalokasikan sumber daya sebagai suatu bentuk <i>governing</i> , sebagaimana juga cara yang sama dilakukan oleh pasar atau birokrasi. Dalam hal ini <i>networks</i> merupakan alternative, bukan hybrid dari market dan hirarki.

---

Sumber: Diolah dari Rhodes,2002,hlm 56-61

Dari ke tujuh definisi tentang *governance* oleh Rhodes, dalam penelitian ini peneliti memakai 1 definisi yaitu *Networks* sebagai *governance* atau sebaliknya memiliki beberapa ciri. Pertama, kesalingtergantungan antarorganisasi yang mencakup aktor bukan negara seperti privat dan voluntary. Kedua, Interaksi yang kontinyu antaranggota *networks* yang disebabkan oleh kebutuhan akan sumber daya atau pertukaran sumberdaya serta negoisasi dalam menyusun tujuan bersama. Ketiga, interaksi *game like*, yang berakar dari *trust* dan diatur oleh aturan main *negoisasi*, disepakati, dan disetujui para partisipan. Keempat, *networks* sebagai institutional

setting relative otonom (*self organizing*) karena tidak bertanggung jawab kepada negara. Namun, negara secara tak langsung dapat saja mengendalikan *networks*.

Selanjutnya, terkait dengan konsep kolaborasi dalam perspektif administrasi publik dapat dijelaskan dengan konsep *institutional building*. Konsep ini muncul pada tahun 1960-an bersamaan dengan konsep administrasi pembangunan. Konsep berkaitan dengan upaya mendesain suatu aransemen organisasi untuk tujuan yang lebih menguntungkan berkaitan masalah keefektifan dan manajerial dalam administrasi publik.

Dalam konteks ini kemudian terletak pentingnya pola hubungan antar lapis pemerintah yang berbasis pada *network (intergovernmental networks)* sebagai salah satu *alternative* untuk dapat keluar dari keterbatasan mengelola hubungan yang berbasis pada paksaan, hierarkis dan legal formal. Pola ini mejadi salah satu *alternative* dalam pengelolaan hubungan antar lapis pemerintahan karena dalam pola *network* ini, posisi antar aktor yang saling berhubungan bersifat sederajat, tanpa adanya hierarkhi yang ketat seperti yang diatur dalam kerangka regulasi legal formal, dengan penuh kesukarelaan tanpa paksaan, serta adanya kesepahaman bersama bahwa terdapat saling keterkaitan dan saling ketergantungan antar lapis pemerintahan. Dalam *intergovernmental networks* ini pula kemudian terjadi proses untuk saling memahami dan mengetahui satu sama lain, membagi informasi satu sama lain, mengidentifikasi masalah secara bersama-sama dan merencanakan aksi untuk mengatasi masalah secara bersama-sama.

## **2.2 Intergovernmental Networks**

Karakter kerjasama pemerintah daerah yang berbasis *intergovernmental networks* pada tingkatan daerah sangat berbeda dengan karakter kerjasama pemerintah daerah yang mengandalkan pada pola organisasi rasional. Pola organisasi rasional memiliki karakter pola hubungan yang bersifat hierarkhis, yang melihat forum organisasi kerjasama sebagai unit yang *koheren* dengan tujuan yang jelas,

prosesnya terstruktur dari atas, diarahkan pada tujuan tertentu, keputusan organisasi didominasi pada kewenangan yang terpusat dan mempunyai tujuan dan nilai yang jelas, prosesnya terstruktur dari atas, diarahkan pada tujuan tertentu, keputusan organisasi didominasi pada kewenangan yang terpusat dan mempunyai tujuan dan nilai yang jelas. Tidak seperti itu, kerjasama pemerintah daerah yang berbasis *networks* lebih didasarkan pada inter-relasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang masing-masing bersifat bebas dan mandiri untuk melakukan relasi satu sama lain. Selain itu, tidak ada struktur kewenangan sentral dan tujuan dari kerjasama tersebut merupakan hasil kesepakatan dari organisasi pemerintah yang menjadi anggota forum kerjasama pemerintah daerah tersebut sebagai perwujudan dari aksi bersama (*collective action*).

Tentu saja tidak mudah menggeser paradigma berorganisasi, dari organisasi rasional kearah *intergovernmental networks* pada tingkatan daerah yaitu adanya relasi tindakan kolektif (*collective actions*) untuk memunculkan tujuan bersama (*common purpose*) dan untuk mengatasi ancaman bersama (*common threats*) seringkali gagal. Hal ini disebabkan karena kurangnya insentif dan hambatan dalam melakukan tindakan kolektif. Penyebab lain adalah tujuan kabur (tidak jelas) dan kurang menarik (tidak provokatif) bagi semua daerah. Yang juga menjadi penyebab penting dalam keberhasilan dan kegagalan *intergovernmental networks* pada tingkatan daerah adalah adanya aktor kunci sehingga absennya aktor kunci yang berfungsi untuk melakukan aktivasi juga menjadi penyebab kegagalan *intergovernmental networks* pada tingkatan daerah. Akhirnya, tidak adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bersama (*common purpose*) juga menjadi faktor penyebab penting.

Untuk dapat mengembangkan proses *intergovernmental networks*, perlu interaksi diantara organisasi pemerintah sebagai anggota forum kerjasama pemerintah daerah dan menekankan pada dimensi *collective action* (tidak ada aktor tunggal) dimana dengan *collective action* tersebut, tujuan dinegoisasikan, budaya digali, pemahaman bersama didorong dan kompromi dibuat diantara organisasi pemerintah yang tergabung dalam sebuah forum kerjasama pemerintah daerah. Selain itu, adanya

struktur insentif yang tepat dan sekumpulan aturan yang tepat dalam sebuah forum kerjasama pemerintah daerah.

Konkritnya, untuk mengembangkan *intergovernmental networks* pada tingkatan daerah tersebut, pertama-tama daerah dapat bekerja bersama-sama untuk menyepakati sasaran dari kerjasama lintas batas. Setelah kesepakatan terbangun, daerah dapat menentukan manfaat dari *network* yang akan dibentuk, misalnya apakah pertukaran informasi, untuk perencanaan strategis, untuk beberapa aksi bersama yang terbatas atau yang lebih luas, atau untuk pengumpulan sumberdaya. Proses selanjutnya adalah pembagian strategi, peranan dan tanggung jawab dari masing-masing daerah dalam rangka mencapai apa yang menjadi kesepakatan bersama tadi.

Dalam konteks ini penulis memakai konsep *intergovernmental network* karena untuk mengetahui apakah kerjasama yang dibangun antara Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Jember bisa dinamakan sebagai aktivitas kerjasama dengan pola hubungan antar lapis pemerintah yang berbasis pada *network* (*intergovernmental networks*) atau bukan.

### 2.2.1 Beberapa Faktor Pendukung Kerjasama Pemerintah Daerah

Pengembangan *intergovernmental networks* pada tingkatan daerah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa diantaranya adalah;

- a. Adanya *focus outward* dari para organisasi pemerintah yang tergabung dalam suatu *network*
- b. Adanya keinginan bersama dari para organisasi pemerintah untuk melihat sesuatu dalam gambaran besar
- c. Adanya refleksi dari para organisasi pemerintah
- d. Adanya kesadaran sendiri dari daerah akan peran dan tanggung jawab
- e. Adanya kapasitas daerah untuk berbagi belajar
- f. Adanya komunikasi yang efektif antar organisasi pemerintah

- g. Adanya kecepatan dalam forum atau lembaga kerjasama pemerintah daerah (kemampuan untuk membuat dan menepati janji dan kemampuan untuk membuat sesuatu terjadi dengan cepat)
- h. Adanya akuntabilitas dalam forum atau lembaga kerjasama pemerintah daerah
- i. Adanya transparansi dalam pembuatan keputusan dalam lembaga kerjasama pemerintah daerah
- j. Adanya pelembagaan yang jelas dalam lembaga kerjasama pemerintah daerah (siapa berwenang apa, respon apa yang bisa diberikan akan adanya ketidaksamaan kekuasaan dan sumberdaya diantara para organisasi pemerintah yang menjadi anggota suatu *network*, dan lain-lain)

#### 2.2.2 Efektivitas Kerjasama Pemerintah Daerah Tergantung pada 7 Variable yaitu :

##### a. Trasparansi

Dalam kerjasama ada transparansi (*transparency*), berupa kemudahan proses pengawasan atau penegasan kepatuhan anggota dengan prinsip utama kerjasama. Sebuah institusi kerjasama akan efektif jika anggotanya mematuhi aturan yang tercantum di dalam hak-hak dan kewajiban mereka. Kepatuhan dapat dibangun dengan tiga prinsip berbeda yaitu, kemudahan untuk mendeteksi pelanggaran yang dilakukan anggota, kemungkinan pelanggar akan menerima sanksi, dan besarnya sanksi yang akan diterima. Hal terpenting yang harus dikembangkan dalam menjaga efektifitas sebuah kerjasama bukan pada pemberian sanksi atupun besarnya sanksi, tetapi lebih ditekankan pada deteksi akan pelanggaran yang dilakukan anggota. Karena pemberian sanksi dalam jangka waktu lama justru akan memperlemah ikatan kerjasama. Penggunaan rasa malu dan hukuman sosial pada anggota yang melanggar kesepakatan bersama akan berfungsi sebagai control pada kepatuhan anggota. Dengan demikian kepatuhan anggota akan terjaga yang selanjutnya bisa menjadi jaminan bagi efektivitas kerjasama yang ada.

b. Kekokohan dan keluwesan (*robustness*)

Efektivitas sebuah lembaga kerjasama tergantung kepada adanya kekokohan dan keluwesan (*robustness*) dalam menyelesaikan segala persoalan yang timbul dalam kerjasama, serta adanya keluwesan dalam mensikapi perkembangan yang terjadi antar anggota tanpa melalui perubahan radikal. Sebuah kerjasama yang terlalu rapuh (*fragile*) ataupun terlalu kaku (*brittle*) akan menjadi tidak efektif, persoalan antar anggota dari perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial dapat menjadikan kerjasama tidak efektif apabila tidak ada prinsip yang kokoh sebagai acuan dan keluwesan dalam mensikapi berbagai permasalahan yang timbul.

c. Perubahan aturan (*transformation rules*)

Perubahan aturan (*transformation rules*) yang terlalu sering dilakukan dalam lembaga kerjasama akan menjadikan kerjasama tidak efektif, perubahan aturan justru akan melemahkan efektivitasnya karena ada peluang bagi anggota untuk selalu merubah aturan yang dipandang memberatkan. Perubahan aturan sulit dilakukan justru akan menjaga efektivitas kerjasama karena akan mendorong anggota untuk mentaati aturan kerjasama.

d. Kapasitas pemerintah (anggota kerjasama)

Efektivitas sebuah kerjasama sangat tergantung pada kapasitas pemerintah (*capacity of governments*) anggota dalam mengimplementasikan aturan yang telah dikeluarkan dalam wilayah yuridiksi pemerintahannya. Keterbatasan sumberdaya pemerintah anggota kerjasama menjadi penghambat implementasi aturan, selain itu lemahnya legitimasi pemerintah anggota kerjasama juga akan menjadi sebab lain yang menjadikan aturan kerjasama tidak bisa dijalankan di dalam yuridiksi anggota. Lemahnya legitimasi menyebabkan tidak adanya kepatuhan masyarakat pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Apabila ini terjadi maka efektivitas dari kerjasama akan melemah karena tidak bisa diimplementasikan di dalam wilayah anggota.

e. Distribusi kekuasaan (*distribution of powers*)

Ketimpangan yang tajam dalam distribusi kekuasaan (*distribution of powers*) di antara anggota akan menghambat efektivitas kerjasama, karena akan ada anggota yang sangat dominan dan dapat memaksakan kemauan pada anggota lain. Tetapi di sisi lain akan ada anggota yang selalu berada dalam posisi untuk tidak bisa menolak kemauan anggota yang lebih dominan. Anggota yang mendapat kekuasaan besar cenderung bisa mengabaikan aturan yang tidak sesuai dengan kepentingannya, sehingga mendorong timbulnya rasa tidak suka dari anggota lain yang dapat menghambat kerjasama. Keseimbangan pembagian kekuasaan antar anggota akan menjadikan kerjasama lebih efektif karena tidak adanya kekuatan yang cukup besar untuk melawan kesepakatan yang telah dibuat.

f. Tingkat ketergantungan (*interdependence*) antar anggota

Efektivitas kerjasama akan tergantung pada tingkat ketergantungan (*interdependence*) antar anggotanya. Ketergantungan timbul apabila aksi dari satu anggota mempengaruhi kesejahteraan anggota lain dalam kerjasama. Mereka yang saling tergantung akan sangat sensitive pada perilaku satu sama lain, sehingga antar anggota akan saling menjaga interaksi mereka untuk tidak bertentangan dengan anggota lain. Tingkat ketergantungan yang tinggi akan meningkatkan efektivitas kerjasama karena masing-masing anggota akan saling menjaga kepentingan anggota lain.

g. Id intelektual (*intellectual order*)

Kerjasama pemerintah daerah tidak dapat bertahan efektif dalam jangka waktu lama apabila substruktur intelektual yang mendasarinya runtuh atau mengalami pengikisan. Efektivitas kerjasama sangat dipengaruhi oleh kekuatan ide dan gagasan yang mendasarinya. Sebuah bentuk kerjasama tidak akan efektif dan tahan lama apabila ide intelektual (*intellectual order*) yang mendasarinya telah roboh, tidak peduli apakah ada ide atau gagasan lain yang menggantikan atau

tidak. Efektivitas sebuah kerjasama akan sangat tergantung pada kuat lemahnya ide atau gagasan yang mendasarinya.

### 2.2.3 Alternatif Kerangka Regulasi Kerjasama Pemerintah Daerah

Beberapa alternative kerangka hukum kerjasama pemerintah daerah diantaranya adalah:

- a. Perjanjian, menyangkut pada materi yang merupakan hal yang sangat prinsipil yang memerlukan pengesahan/ratifikasi
- b. Persetujuan, dimana cakupan materi yang diatur di dalam jenis peraturan seperti ini lebih sempit dari perjanjian. Sifat persetujuan ini biasanya lebih mengatur hal hal yang teknis.
- c. Deklarasi, yang merupakan perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan umum dimana para pihak bersepakat untuk melakukan kebijakan-kebijakan tertentu di masa mendatang
- d. Memorandum of Understanding (MoU), yang merupakan bentuk perjanjian yang umumnya mengatur pelaksanaan suatu perjanjian induk. Namun demikian apabila materi yang diatur sifatnya sangat teknis, bentuk ini dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan persetujuan induk.

Dalam konteks ini alternative kerangka hukum kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Jember menggunakan Memorandum of Understanding (MoU) yang tertuang dalam piagam kesepakatan bersama antara universitas jember dan pemerintah kabupaten banyuwangi Nomor 2579/UN25/PS.8/2012 dan Nomor 188/4/429.011/2012 perihal komitmen untuk melakukan kerjasama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat.

Yang menjadi catatan penting dalam alternative kerangka hukum kerjasama pemerintah daerah ini adalah bahwa pengaturan legal-formal bagi kerjasama pemerintah daerah bisa jadi akan sangat *counterproductive* dengan semangat *network* yang dibangun dalam forum atau lembaga kerjasama pemerintah daerah. Seperti sudah diraikan di muka, karakter *network* sangat berbeda dengan karakter relasi yang

dikelola secara legal-formal yang biasanya bersifat lebih kaku dan sangat ketat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin formal pengaturan kerjasama antar organisasi pemerintah tersebut, maka derajat *networknya* menjadi makin lemah.

Kesadaran akan pentingnya kerjasama pemerintah daerah seperti disebutkan di atas sudah menjadi kesadaran semua pihak di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dijaminnya kerjasama pemerintah daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 Bab IX tentang kerjasama dan penyelesaian dalam Pasal 195 dan pasal 196.

Untuk mengembangkan kerjasama pemerintah daerah, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam program banyuwangi cerdas bermitra dengan beberapa universitas yang berada di luar daerah kabupaten banyuwangi. Untuk itu peneliti memakai konsep kemitraan.

## **2.3 Kemitraan**

### **2.3.1 Pengertian Kemitraan**

Kemitraan pada esensinya dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

OECD (1990:18) mendefinisikan kemitraan sebagai system kerjasama formal, didasarkan pada aturan hukum yang mengikat atau pemahaman informal, hubungan kerjasama, dan saling mengadopsi rencana dari sejumlah lembaga. Mereka melibatkan kesepakatan tentang tujuan kebijakan dan tanggung jawab program, sumber daya, risiko dan manfaat atas periode tertentu.

Hutchinson dan Campbell (1998:9) menyatakan bahwa ada beberapa konsensus mendefinisikan : kemitraan meenyatukan koalisi kepentingan diambil dari lebih dari satu sektor untuk menghasilkan kesepakatan; kemitraan memiliki tujuan umum dan

strategi untuk mencapainya; berbagai resiko kemitraan, sumber daya dan ketrampilan; kemitraan mencapai saling menguntungkan dan sinergi.

Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum (Promkes Depkes RI) meliputi:

- a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan "mitra" atau "partner"
- b. Kemitraan adalah proses pencarian /perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama
- c. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing
- d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan.

### 2.3.2 Prinsip Kemitraan

Terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan yaitu:

- a. Prinsip kesetaraan (*Equity*)  
Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjamin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati
- b. Prinsip keterbukaan  
Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing – masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain.

Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling meleengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra)

c. Prinsip Azaz manfaat bersama (*mutual benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

### 2.3.3 Langkah – langkah kemitraan

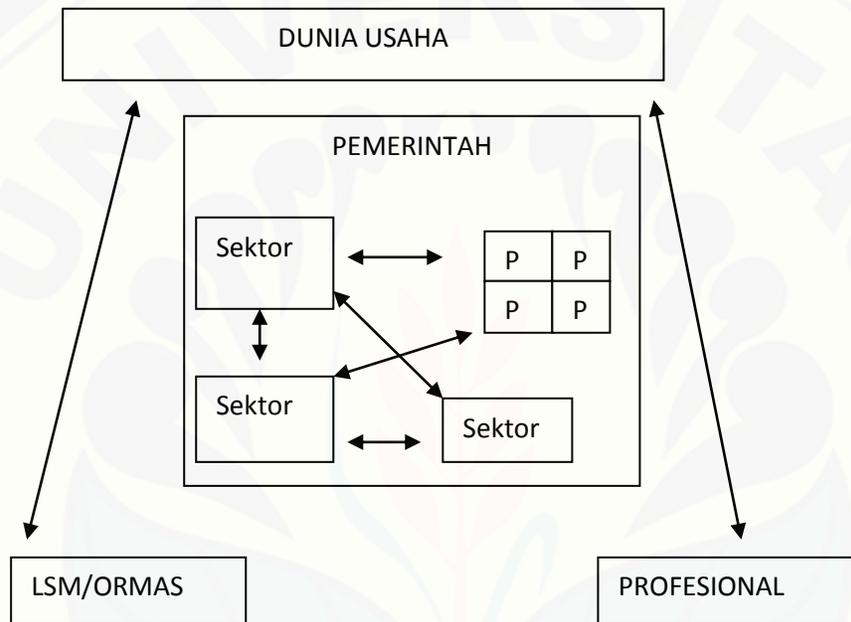
Kemitraan memberikan nilai tambah kekuatan kepada masing-masing sektor untuk melaksanakan visi dan misinya. Namun kemitraan juga merupakan suatu pendekatan yang memerlukan persyaratan, untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengenalan masalah
- b. Seleksi masalah
- c. Melakukan identifikasi calon mitra dan pelaku potensial melalui surat menyurat, telepon, kirim brosur, rencana kegiatan, visi, misi, AD/ART
- d. Melakukan identifikasi peran mitra/jaringan kerjasama antar sesama mitra dalam upaya mencapai tujuan, melalui diskusi, forum pertemuan, kunjungan kedua belah pihak, dll
- e. Menumbuhkan kesepakatan yang menyangkut bentuk kemitraan, tujuan dan tanggung jawab, penetapan rumusan kegiatan memadukan sumberdaya yang tersedia di masing-masing mitra kerja, dll. Kalau ini sudah ditetapkan, maka setiap pihak terbuka kesempatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bervariasi sepanjang masih dalam lingkup kesepakatan
- f. Menyusun rencana kerja : pembuatan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan, pengaturan peran, tugas dan tanggung jawab
- g. Melaksanakan kegiatan terpadu: menerapkan kegiatan sesuai yang telah disepakati bersama melalui kegiatan, bantuan teknis, laporan berkala, dll

h. Pemantauan dan evaluasi

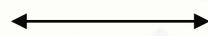
2.3.4 Ruang Lingkup Kemitraan

Ruang lingkup kemitraan secara umum meliputi pemerintah, dunia usaha, LSM/ORMAS, serta kelompok profesional. Departemen Kesehatan RI secara lengkap menggambarkan ruang lingkup kemitraan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 2.1 Diagram Ruang Lingkup Kemitraan

Keterangan:



: Saling bekerjasama

Sektor

: Sektor-sektor dalam pemerintah

P

: Program-program dalam sektor

(Notoatmodjo,2007)

### 2.3.5 Model-model Kemitraan dan Jenis Kemitraan

Model kemitraan oleh Sulistyani (dalam Kusumadewi, 2012) diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkatnya ke dalam pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi beberapa model berikut.

- a. *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama yang seimbang antara yang satu dengan lainnya.
- b. *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu untuk saling memberikan manfaat lebih sehingga tercapai tujuan secara optimal.
- c. *Conjuntion partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan merupakan kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dalam proses kehidupannya, “paramecium” melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah untuk selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri.

Adapun model kemitraan yang lain yang dikembangkan berdasar atas azas kehidupan organisasi menurut Sulistyani (dalam Kusumadewi, 2012) antara lain sebagai berikut.

- a. *Subordinate union of partnership*, kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan, atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain.
- b. *Linear Union of partnership*, kerjasama ini dilakukan oleh organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif, baik tujuan, misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status, dan legalitas.
- c. *Linear Collaborative of partnership*, kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saing mengisi satu dengan yang lainnya.

Goddard, dengan mengutip kategori Lyon, mengemukakan empat model relasi pemerintah dengan organisasi sektor ketiga, khususnya dalam bidang pendanaan dalam pelayanan sosial.

a. Model philanthropic

Pemerintah memberikan dukungan terhadap suatu proyek setelah didekati oleh organisasi masyarakat

b. Model submission

Pemerintah menyediakan dana secukupnya untuk suatu proyek dan organisasi sektor ketiga menentukan lokasi pelayanan

c. Model planning

Pemerintah menentukan secara penuh rencana dan lokasi proyek

d. Model penawaran bersaing

Pemerintah menentukan perangkat aturan dan standar dan sekaligus memantau penyediaan pelayanan (yang dilakukan oleh organisasi sektor ketiga)

Mengutip McIntosh, Goddard mengemukakan tiga tipe kemitraan dengan dasar perbedaan rasional.

a. Model sinergi atau nilai tambah, dengan tujuan meningkatkan nilai lebih dari apa yang dapat dicapai oleh organisasi secara mandiri

b. Model transformasi, menekankan perubahan tujuan dan kultur mitra organisasi dan kemampuan organisasi untuk meyakinkan mitra lain akan nilai dan tujuan yang dipegangnya

c. Model pembengkakan anggaran, menekankan pada kemampuan untuk memperoleh dan menarik anggaran besar yang mempengaruhi kebijakan atau pemecahan masalah sosial

Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy (2004), ada empat jenis atau tipe kemitraan yaitu :

a. *Potential Partnership*

Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum bekerja sama secara lebih dekat

b. *Nascent Partnership*

Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal

c. *Complementary Partnership*

Pada kemitraan ini, partner/mitra mendapat keuntungan dan penambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti *program delivery* dan *resource mobilization*

d. *Synergistic Partnership*

Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian

Bentuk-bentuk/tipe kemitraan menurut Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI yaitu terdiri dari aliansi, koalisi, jejaring, konsorsium, kooperasi, dan *sponsorship*. Bentuk-bentuk kemitraan tersebut dapat tertuang dalam:

- a. SK bersama
- b. MOU
- c. Pokja
- d. Forum Komunikasi
- e. Kontrak Kerja/perjanjian kerja

Bentuk kemitraan pemerintah daerah kabupaten banyuwangi dengan universitas Jember seperti yang di ungkapkan sebelumnya dalam alternative hukum kerjasama pemerintah daerah, bahwa bentuk/tipe kemitraan yang dilaksanakan menggunakan MoU yang tertuang dalam piagam kesepakatan bersama antara

universitas jember dan pemerintah kabupaten banyuwangi Nomor 2579/UN25/PS.8/2012 dan Nomor 188/4/429.011/2012 perihal komitmen untuk melakukan kerjasama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat.

## 2.4 Implementasi

Masalah pelaksanaan program pembangunan dalam hal ini pembangunan dibidang pendidikan merupakan komitmen pemerintah kabupaten Banyuwangi yang bertujuan mempercepat terpenuhinya kebutuhan masyarakat demi beranjak pada proses peningkatan kesejahteraan. Berbagai program pembangunan yang dilakukan beranekaragam, baik yang berwujud fisik maupun non-fisik di daerah perkotaan maupun pedesaan dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan lancar mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

”Implementasi adalah bermuarabpada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman,2002:70).

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementaai adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementai tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Impementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

”Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta

memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”(Setiawan,2004:39).

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan memlakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yng bisa dipercaya.

Menurut Hafiah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

”Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menajdi tindakan kebijkan dari politik ke dalam administrasi Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaaan suatu program”(Harsono,2002:67)

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi dalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainyatujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnan akhir. Oleh karena tu suatu implementai baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan.

Dalam ensiklopedia administrasi dikemukakn bahwa implementasi adalah ”aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melancarkan semua rencana-rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melakukan, dimana tempat dilaksanakan, kapan waktu berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”.

Sehubungan dengan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu program, Van Meter dn Van Hom (dalam Suharsono,2005:99) mengemukakan enam variable yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

1. Standar dan Sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiimplementasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk ini diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik agen pelaksana

Agar pelaksana mencakup struktur birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variable ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yaitu (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang akan dipengaruhi kemauanya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Pengertian tersebut diatas membrikan gambaran bahwa implementasi sebagai suatu aktivitas atau upaya pelaksanaan suatu program kebijaksanaan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya, waktu dan tempat serta tata cara melaksanakan. Berkenaan dengan itu, pengertian implmentasi menurut Abdullah adalah:

”Kegiatan tindak lanjut (setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan) yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari proram kebijaksanaan yang ditetapk semula”.

Selain itu dikemukakan juga bahwa proses implementasi mengandung tiga (3) unsur :

1. Adanya program (kebijaksanaan), yang merupakan konsep kebijaksanaan sebagai tujuan.
2. Adanya target group, yang merupakan kelompok sasaran sebagai peserta dalam penetapan program.
3. Adanya suatu pelaksanaan (implementer), yang merupakan penyelenggara program dengan menggunakan strategi tertentu.

Suatu proses implementasi dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasilmaupun gagal sama sekaali ditinjau dari hasil yang dicapai, karena dalam proses tersebut turut bermain dan telibat berbagai unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung meupun menghambat pencapaian sasaran program (Abdullah, 1987). Berhasil atau terhambatnya suatu proses implementasi karena ada faktor-faktor atau unsur –unsur yang mempengaruhinya.

Seperti yang di kemukakan Edwards III, bahwa berhasil atau terhambatnya suatu proses implementasi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu;

1. Komunikasi;

Proses komunikasi efektif diperlukan dalam kerangka pelaksanaan kebijakan. Pimpinan harus mengkomunikasikan kebijakan yang akan dilaksanakan kepada bidang yang bertanggung jaawab agar dapat

memahami maksud dan tujuan kebijakan. Komunikasi adalah perekat organisasi dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi dan integrasi. Komunikasi antar komponen pelaksana program Banyuwangi Cerdas perlu ditingkatkan secara intensif agar kinerjanya dapat optimal.

2. Sumber Daya (resource);

Betapapun jelasnya proses komunikasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan betapapun perintah dan kewenangan sudah diberikan tetapi kalau sumberdaya yang tersedia tidak mendukung hal ini dapat menghambat pelaksana kebijakan. Adapun pentingnya masalah sumberdaya dalam pelaksanaan program Banyuwangi Cerdas di tingkat pendidikan tinggi mencakup, Dosen yang dilibatkan, Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mahasiswa calon penerima program Banyuwangi Cerdas.

3. Sikap Birokrasi dan Pelaksana;

Sikap yang dimaksud adalah sikap pelaksana program Banyuwangi Cerdas. Hal ini terkait dengan adanya sikap yang kuat bagi pelaksana yang memiliki kapasitas dalam melaksanakan program. Komponen pelaksana program perlu sepenuh hati dan memiliki komitmen dalam melaksanakan fungsinya sehingga menghasilkan pandangan yang seimbang bahwa program dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah kabupaten Banyuwangi.

4. Faktor Struktur Birokrasi.

Dalam pelaksanaan program Banyuwangi Cerdas ini memerlukan Banyak orang. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tidak dapat berjalan sendiri. Seperti halnya dengan bermitra dengan Universitas Jember. Akan tetapi bukan hanya Universitas Jember saja yang terlibat, ada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan juga calon mahasiswa penerima program Banyuwangi Cerdas.

## 2.5 Program Banyuwangi Cerdas

Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dengan aspek kebijakan. Menurut Dye (1992), kebijakan atau dalam hal ini adalah kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai “*Whatever government choose t do or not to do*”. Hal tersebut diperkuat oleh Hogwood dan Gunn (1986) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Dan sebagai suatu instrument yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan publik dapat berbentuk aturan-aturan umum dan khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu.

Sedangkan pengertian program itu sendiri, menurut Jones (1984), program adalah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini program pemerintah berarti upaya mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

UU No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya menurut amanat Undang-undang tersebut, maka setiap pemerintah daerah wajib melaksanakannya berdasarkan potensi dan tata kelola anggaran setiap daerah. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Banyuwangi membuat program pemerintah yang disebut dengan program Banyuwangi cerdas.

Menurut konten buku banyuwangi (2013:35), program Banyuwangi Cerdas merupakan suatu bentuk program inovasi dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang diluncurkan untuk memberi jaminan bagi setiap siswa mendapatkan pendidikan

hingga jenjang SMA, bahkan perguruan tinggi. Kerangka program Banyuwangi Cerdas diimplementasikan melalui penerbitan Kartu Banyuwangi Cerdas dan Kartu Banyuwangi Belajar. Dua kartu itu berfungsi sebagai jaminan kelangsungan belajar siswa mulai sekolah dasar hingga mahasiswa, khususnya bagi anak yang kurang mampu. Hal tersebut sesuai dengan peraturan bupati banyuwangi nomor 15 tahun 2013 Tentang program banyuwangi cerdas bahwa program disusun dalam rangka mendukung penjaminan kelangsungan belajar bagi peserta didik pendidikan dasar, menengah dan mahasiswa berprestasi Kabupaten Banyuwangi.

Dalam pedoman pelaksanaan program Banyuwangi cerdas kabupaten banyuwangi (2013), Fasilitas program Banyuwangi Cerdas yang ditujukan untuk memberikan pelayanan di bidang pendidikan antara lain sebagai berikut:

Bentuk Fasilitas Program Banyuwangi Cerdas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupa:

- a. Kartu Banyuwangi Belajar untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berasal dari keluarga miskin;
- b. Kartu Banyuwangi Cerdas untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran mahasiswa pada pendidikan tinggi yang berprestasi dan berasal dari keluarga miskin.

Sementara itu waktu pembelajaran Program Banyuwangi Cerdas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, diatur sebagai berikut :

- a. Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan dasar selama 9 tahun, yang dimulai dari kelas I SD/MI sampai dengan kelas IX SMP/MTs;
- b. Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan menengah selama 3 Tahun, yang dimulai dari kelas X sampai dengan XII SMA/MA/SMK/MAK;
- c. Waktu pembelajaran untuk jenjang pendidikan tinggi selama 4 Tahun.

## 2.6 Perguruan Tinggi

Sejak lahirnya Tridharma Perguruan tinggi yang ditetapkan dalam Undang-undang No.22, Tahun 1961 yang menetapkan bahwa sebuah perguruan tinggi seperti universitas, institute, sekolah tinggi, akademi, dan sebagainya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, ada beberapa karakteristik perguruan tinggi;

1. Perguruan tinggi yang karena tugasnya sering kali merupakan lembaga yang mudah untuk bergabung atau bekerjasama dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, baik dalam pekerjaan, pendidikan, penelitian, maupun proyek-proyek pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, perguruan tinggi sering memiliki otonomi dalam pengelolaan administrasinya meskipun untuk perguruan tinggi negeri, otonomi ini sering kali memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu.
2. Karena perguruan tinggi harus memperhatikan semakin luasnya anak didik yang menuntut tempat di perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas hidupnya tidak jarang perguruan tinggi yang memberikan kesempatan untuk mahasiswa yang berbakat untuk memperoleh beasiswa.
3. Perguruan tinggi sebagai penghasil tenaga profesional
4. Perguruan tinggi sebagai penghasil tenaga ahli

Karena karakteristik tersebut, perguruan tinggi berfungsi sebagai lembaga atau pusat pembaharuan dalam masyarakat.

Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan atau secara simultan diperhatikan demi suksesnya peranan dan tugas tersebut, sebelum masyarakat member peranan dan tugas kepada perguruan tinggi, yaitu;

1. Menyesuaikan program pendidikan dengan kepentingan real dari masyarakat atau kepentingan nasional.
2. Merencanakan program pengadaan dan penataran dosen secara teratur dengan jadwal waktu dan rencana yang matang.

3. Mengusahakan sarana material (bujet,gaji,tunjangan kehormatan, kesejahteraan dan perumahan) yang cukup dan layak sesuai dengan tugas dan martabah seorang dosen yang juga harus dihormati mahasiswanya.
4. Secara terencana, artinya sesuai skala prioritas suatu system, melengkapi sarana teknis mengajar dan belajar.
5. Membentuk badan peneliti dan pengembangan kurikulum.
6. Membentuk badan pelaksana kerjasama dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
7. Mengusahakan terbentuknya badan Pembina pendidikan dan pengabdian beranggotakan paling sedikit terdiri atas perguruan tinggi, pemerrintah setempat, lembaga pendidikan lainnya (negeri dan swasta), eksponen masyarakat, dan sebagainya.

Faktor-faktor di atas dapat menjadi sarana untuk mencapai suatu usaha pendidikan yang menjadi tugas perguruan tinggi seperti;

1. Pengembangan pribadi mahasiswa yang memahami kemungkinan perkembangan potensi dan kemampuannya.
2. Setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk secara maksimal mengembangkan dirinya dalam suatu program studi yang sesuai. Program studi tersebut sesuai dengan bakat yang telah dicatat sejak mahasiswa yang bersangkutan diterima berdasarkan daftar kemajuan sejak sekolah menengah.
3. Bimbingan pribadi (tutorial atau mentoring) yang dilakukan oleh dosen ahli yang bekerjasama dengan orang tua serta dibantu oleh sarana administrasi dan struktur akademis yang efisien. Dosen terutama harus mencurahkan perhatian kepada perkembangan mahasiswa sebagai manusia kemudian sebagai tenaga perencana atau tenaga kerja yang termpil.
4. Karena sifat pendidikan yang efektif, program studi, program ekstra kurukuler, serta pelayanan terhadap mahasiswa bersifat sinkron dan menyeluruh sehingga mata kuliah yang dipilih benar-benar relevan dengan bakat dan tujuan.
5. Metode dan program studi yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan belajar.

6. Program studi yang menjamin kelanjutan proses belajar seumur hidup, dan sebagainya.

Selanjutnya perguruan tinggi tersebut dapat melakukan peranan dalam rangka pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk lembaga-lembaga pemerintah seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas-dinas, dan sebagainya dalam kegiatan-kegiatan antara lain;

1. Menyusun rencana pembaharuan pendidikan
2. Mengembangkan rencana dan pelaksanaan suatu system pendidikan
3. Membina sekolah menengah yang dapat mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan pendidikan seperti antara lain: (a) menguasai ilmu pengetahuan yang berguna untuk memahami manusia dan alam sekitarnya dan mampu mengambil langkah-langkah nasional yang perlu; (b) mengembangkan ketrampilan untuk belajar dan berindak atau berkomunikasi secara efisien dan efektif; (c) perkembangan belajar seumur hidup; (d) pengembangan dan pelaksanaan system nilai; (e) perkembangan kemampuan dan ketrampilan untuk mengambil keputusan; (f) pengembangan ketrampilan kerja; (g) kemampuan menjaga kesehatan dan membina kesejahteraan; serta (h) kemampuan melakukan hubungan social yang harmonis dan bermartabat.
4. Melaksanakan dan membantu penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
5. Membantu masyarakat dengan jalan menyelenggarakan program kursus dalam berbagai ilmu dan ketrampilan
6. Membantu usaha pendidikan nonformal dengan jalan menyelenggarakan diskusi-diskusi terbuka yang dapat diikuti oleh masyarakat.
7. Melakukan penyuluhan dalam bidang – bidang tertentu, seperti pertanian, kesehatan, teknologi tepat guna, pengarahan bakat, penyuluhan keagamaan, dan sebagainya.

Dalam konteks ini, Perguruan Tinggi yang akan diteliti yaitu Universitas Negeri Jember. Sebagai salah satu Universitas yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam program Banyuwangi Cerdas.

## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001:3) mendefinisikan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesis atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti (Mardalis, 2008:26). Dalam penelitian ini peneliti bermaksud mendeskripsikan pelaksanaan kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Jember dalam program Banyuwangi Cerdas.

### **3.2 Fokus atau Batasan Penelitian**

Pada dasarnya suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Menurut Moleong (2008:94), ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus, yaitu:

“*Pertama*, agar dapat membatasi fokus, sehingga peneliti tidak perlu kesana kemari untuk mencari subjek penelitian karena sudah dengan sendirinya dibatasi oleh fokusnya. *Kedua*, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti bisa mengetahui data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data.”

Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis tentang pelaksanaan kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Jember dalam program Banyuwangi Cerdas yang meliputi:

1. Proses kemitraan;
2. Proses pelaksanaan kemitraan;
3. Kendala dalam pelaksanaan kemitraan;
4. Pencapaian.

### **3.3 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah kemitraan pemerintah daerah kabupaten banyuwangi dengan universitas Jember dalam program Banyuwangi cerdas.

### **3.4 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Banyuwangi, dengan pertimbangan Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang memiliki indeks

pembangunan manusia tertinggi sekarisidenan besuki (lumajang, jember, situbondo, bondowoso, probolinngo).

Tabel 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Se-Karesidenan Besuki 2006-2012

No	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Lumajang	65,90	66,20	66,65	67,26	67,82	68,55	69,00
2	Jember	63,04	63,27	63,71	64,33	64,95	65,53	65,99
3	Banyuwangi	66,80	67,24	67,80	68,36	68,89	69,58	70,53
4	Bondowoso	60,36	60,76	61,26	62,11	62,94	63,81	64,98
5	Situbondo	61,79	62,64	63,06	63,69	64,26	64,67	65,06
6	Probolinggo	60,63	60,97	61,44	62,13	62,99	63,84	64,35

Sumber: BPS Jawa Timur

Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2014 namun dengan rentang waktu sasaran penelitian pada tahun angkatan 2011-2014 untuk memberikan gambaran terkait proses kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten banyuwangi dengan universitas Jember dalam program banyuwangi cerdas.

### 3.5 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dimaksud adalah berkaitan dengan sumber-sumber penyedia informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian penelitian. Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong (2001: 112), “Sumber data utama dalam penelitian adalah kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan sebagainya adalah data tambahan seperti dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dan lain-lain”.

Adapun sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data-data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti tanpa perantara. Data primer sangat penting dalam penelitian karena merupakan data utama yang penting, yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Dalam penelitian ini, informan yang diambil peneliti adalah informan yang terkait dan terlibat langsung dalam program Banyuwangi Cerdas di kabupaten banyuwangi, yaitu Kepala bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten banyuwangi (Drs. Nurul Cholili), Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi (Sumiati S.Sos Kasubag Penyusunan Program), Bapak Suratno (Kepala Bidang pendidikan menengah Dinas pendidikan kabupaten banyuwangi), BAAK universitas jember (Bapak Sabar), Staff kemahasiswaan universitas Jember (Suprpto,S.H), Penerima Dana Program banyuwangi Cerdas (Ahmad Rizqi Andi).

## 2. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di ambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu data yang telah terbentuk dalam dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dan dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Data sekunder dapat berupa dokumen, catatan, laporan, majalah ilmiah, makalah, karya tulis ilmiah, dan sebagainya yang mendukung penelitian.

Adapun data-data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang – undang Nomor 20 tahun 2013 tentang sistem pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3301)
- b. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
- c. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan P[emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- f. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- g. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan
- i. Peraturan Bupati Banyuwangi Nompur 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas Kabupaten Banyuwangi
- j. Piagam kesepakatan bersama antara universitas jember dan pemerintah kabupaten banyuwangi Nomor 2579/UN25/PS.8/2012 dan Nomor 188/4/429.011/2012 perihal komitmen untuk melakukan kerjasama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat.

### **3.6 Informan Penelitian**

Menurut pendapat Moleong (2006 : 90) Informan adalah:”orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dan secara sukarela memberikan pandangan dari segi nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian”.

Menurut Faisal (1990:56) kriteria untuk menentukan informan itu sendiri yaitu:

1. Subjek telah cukup lama intensif dengan kegiatan untuk medan aktivitas yang menjadi perhatian peneliti
2. Subjek masih terlibat aktif atau penuh dalam lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.
3. Subjek memiliki cukup banyak waktu dan kesempatan
4. Subjek dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah untuk diminta informasi atau dikemas terlebih dahulu.
5. Subjek yang sebelumnya tergolong asing dengan peneliti

Menurut Moleong (2006:224) yang menyatakan bahwa “pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sampling*).” Oleh karena itu untuk menentukan siapa saja informan awal yang akan diteliti, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik *snowball* (bola salju) yang memanfaatkan jasa informan kunci (*key informan*). Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2004:97) bahwa:” teknik *snowball sampling* adalah teknik penentuan *sample* (informan) yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar”. Artinya dalam penentuan informan, peneliti dalam penelitiannya ini tidak membatasi berapa jumlah informan yang akan diteliti tetapi disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diperlukan sehingga didapat keseragaman informasi itu sendiri.

Dalam penelitian ini informan yang penulis pilih adalah informan dalam satuan kajian kelompok yang keseluruhannya berjumlah 6 informan. Informan-informan tersebut antara lain:

1. Kepala bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten banyuwangi (Drs. Nurul Cholili)
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi (Sumiati S.Sos Kasubag Penyusunan Program Dinas pendidikan kabupaten banyuwangi)

3. Bapak Suratno (Kepala Bidang pendidikan menengah Dinas pendidikan kabupaten banyuwangi)
4. BAAK universitas jember (Bapak Sabar)
5. Staff kemahasiswaan universitas Jember (Suprpto,S.H)
6. Penerima beasiswa Program banyuwangi Cerdas (Ahmad Rizqi Andi)

Tabel 3.2 Informan

<b>Informan</b>	<b>Alasan</b>
Drs. Nurul Cholili	Pihak Pemkab Banyuwangi yang terlibat dalam program Banyuwangi Cerdas
Sumiati S.Sos	Pihak Dinas Pendidikan Banyuwangi yang terlibat dalam program Banyuwangi Cerdas
Suratno	Pihak Dinas Pendidikan Banyuwangi yang terlibat dalam program Banyuwangi Cerdas
Sabar	Pihak Universitas Jember yang terlibat dalam program Banyuwangi Cerdas
Suprpto,S.H	Pihak Universitas Jember yang terlibat dalam program Banyuwangi Cerdas
Ahmad Rizqi Andi	Ketua Penerima Program Banyuwangi Cerdas

### 3.7 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik dan alat perolehan data sesuai dengan pengertian dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:24) merupakan suatu

uraian yang menjelaskan cara serta instrumen atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Menurut Sugiyono (2011:223), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dan alat perolehan data sebagai berikut.

#### 1. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:54), observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Faisal (1990) sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2011:226), observasi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar, serta observasi yang tak berstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi secara langsung. Pada jenis penelitian ini, peneliti dari awal berterus terang kepada sumber data terkait maksud dan tujuannya dalam rangka penelitian. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses observasi ini adalah kamera untuk mendokumentasikan hasil observasi peneliti dan handphone digunakan untuk merekam pada saat proses wawancara dengan informan.

#### 2. Wawancara

Menurut Usman dan Akbar (2003:57), wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Esterberg (2002) yang dikutip dari Sugiyono (2011:233) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Dalam wawancara semiterstruktur, proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Dalam proses wawancara ini, peneliti akan terlebih dahulu

membuat garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses adalah buku catatan, alat perekam, dan kamera untuk mendokumentasikan hasil wawancara.

Adapun informasi – informasi yang akan digali dari wawancara tersebut antara lain:

- a. Bentuk mitra / kerjasama diejawantahkan dalam bentuk apa?
- b. Adakah indicator keberhasilan
- c. Mulai kapan program banyuwangi cerdas diberlakukan kerjasama
- d. Sebaran ke fakultas mana saja
- e. Kenapa lebih besar di fakultas “A”
- f. Lulusan SMA yang berminat ke perguruan tinggi ada peningkatan / tidak setelah adanya PBC
- g. Apa yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten banyuwangi (kenapa harus bermitra)
- h. Kendala – kendala apa saja yang terjadi pada saat proses pelaksanaan mitra

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Usman dan Akbar (2003:73) memaparkan bahwa dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah semua dokumen yang berkaitan dengan Program Banyuwangi cerdas di kabupaten Banyuwangi, antara lain: data anggaran dana pendidikan dan realisasinya untuk program Banyuwangi cerdas, serta dokumen-dokumen lain yang relevan untuk mendukung proses penelitian ini seperti: segala aturan-aturan atau dasar hukum yang berkaitan dengan program, baik itu peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dalam negeri, peraturan bupati, serta keputusan-keputusan bupati yang menyangkut pendidikan. Selain itu, dokumentasi berupa foto, catatan harian, dan hasil rekaman proses observasi dan

wawancara dapat juga dijadikan sebagai salah satu dokumen penting yang mendukung penelitian ini.

### 3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang terakhir digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Menurut Prastowo (2012:231), triangulasi merupakan teknik pengumpulan data gabungan. Teknik triangulasi dalam proses pengumpulan data digunakan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran atas suatu fenomena yang diamati. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2011:241) yang menyatakan bahwa triangulasi digunakan oleh peneliti bukan hanya sebatas sebagai teknik untuk mengumpulkan data, akan tetapi peneliti juga dapat sekaligus melakukan *cross check* kredibilitas data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data dan sumber data yang lain.

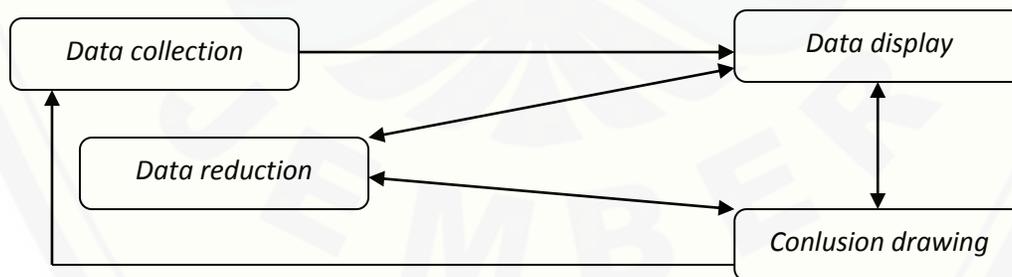
Secara lebih lanjut, Sugiono (2011:241) membagi triangulasi dalam dua kategori, yaitu: triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Triangulasi teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2011:241), merupakan teknik yang dipakai ketika peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Sementara itu, triangulasi sumber data menurut Sugiono (2011:241), merupakan teknik yang dipakai untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dimana disitu peneliti membepoleh data dari beberapa informan yang berbeda. Mulai dari Pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pihak Universitas Jember maupun Pihak Penerima Program Banyuwangi Cerdas.

#### 3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Teknik penyajian dan analisis data merupakan metode penelitian terakhir dalam proses penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:24), teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara

mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Menurut Prastowo (2012:237), berbicara tentang teknik penyajian dan analisis data pada penelitian kualitatif artinya berbicara tentang cara mengolah dan melakukan analisis data kualitatif. Sementara itu, Moleong (2012:247) secara lebih taktis menjelaskan bahwa proses analisis data dalam suatu penelitian dimulai dengan melakukan telaah terhadap seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber. Setelah menelaah data yang telah terkumpul, peneliti dapat melakukan proses reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu membuat rangkuman atas inti, proses, dan pernyataan yang dianggap penting untuk tetap dilibatkan dalam penelitian. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif dalam menganalisis data adalah menyusun satuan-satuan yang kemudian dikategorikan sekaligus melakukan proses *koding*. Tahap analisis data yang diterakhir ditutup dengan proses pemeriksaan keabsahan data untuk menjaga validitas data yang ada.

Senada dengan pendapat di atas, Miles dan Huberman (2007:16) yang dikutip dari Prastowo (2012:241), membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan, yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat divisualisasikan ke dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman [Sumber: Miles dan Huberman (2007:20) yang dikutip dari Prastowo (2012:243)]

Gambar 3.1 di atas memberikan gambaran terkait proses analisis interaktif menurut Miles dan Huberman Miles dan Huberman (2007:20) yang dikutip dari Prastowo (2012:243), menyangkut *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan atau verifikasi) yang akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu tahap analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, membuat abstraksi, serta memfokuskan data-data yang telah diperoleh oleh peneliti. Prastowo berpendapat (2012:242) bahwa proses reduksi data akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif tersebut berlangsung. Dengan kata lain, proses reduksi data berjalan selama pengumpulan data berlangsung bahkan proses ini terjadi setelah penelitian lapangan berakhir dan laporan akhir tersusun dengan lengkap. Proses reduksi data ini dapat dilakukan dengan memilah-milah data dan mencari pola yang dibutuhkan dalam penelitian. Disini peneliti memilih data – data yang dibutuhkan di dalam penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan kemitaan pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Jember akan tetapi tidak menghilangkan data-data yang tidak dibutuhkan begitu saja melainkan menyimpannya apabila dibutuhkan untuk kelengkapan data penelitian.

#### 2. Penyajian Data

Proses penyajian data dalam analisis data kualitatif menurut Prastowo (2012:244), terdiri dari sekumpulan informasi yang tersusun untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakannya. Penyajian data yang benar akan mampu membawa pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif ini. Data yang terkumpul dan telah melalui proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, jaringan, dan teks yang bersifat naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan berbagai macam sumber informan terkait program

banyuwangi cerdas dalam lingkup perguruan tinggi dalam bentuk narasi, bagan dan tabel.

### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data menurut Miles dan Huberman. Setelah semua data yang terkumpul dijamin dengan melakukan proses reduksi data kemudian akan disajikan sebagai bentuk proses penyajian data. Data yang telah disajikan kemudian akan membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari penelitian tersebut. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Menurut Sugiyono (2011:253), kesimpulan adalah temuan baru dalam sebuah penelitian. Temuan baru ini berfungsi untuk memberikan gambaran baru terhadap suatu objek penelitian yang dahulu masih terlihat samar bahkan gelap.

Menurut Prastowo (2012:249) proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi membuat sebuah proses jalinan yang terjadi sebelum, selama, dan sesudah proses pengumpulan data untuk membangun sebuah wawasan secara umum ini dikenal dengan istilah analisis. Melalui model analisis data kualitatif ini, peneliti dalam penelitian ini mencoba menganalisis data yang telah terkumpul untuk mampu menghasilkan sebuah informasi baru yang menjadi jawaban atas penelitian ini. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan terkait kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Jember dalam program Banyuwangi Cerdas.

### 3.9 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif sejak awal sebenarnya sudah ada usaha meningkatkan derajat kepercayaan yang disini disebut keabsahan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang dikatakan tidak ilmiah, juga

merupakan sebagian unsur yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif. Dengan kata lain jika peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat sesuai dengan teknik pemeriksaan keabsahan data maka jelas bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi.

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Adapun kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2 Kriteria dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

<b>Kriteria</b>	<b>Teknik pemeriksaan</b>
Kredibilitas	(1) Perpanjangan keikutsertaan (2) Ketekunan pengamatan (3) Triangulasi (4) Pengecekan sejawat (5) Kecukupan referensial (6) Pengecekan anggota
Keterangan	(7) Uraian rinci
Kebergantungan	(8) Audit kebergantungan
Kepastian	(9) Audit kepastian

Sumber: Moleong: (2001:175)

#### 1. Perpanjangan keikutsertaan

Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen penelitian itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. hal ini untuk mengukur derajat kepercayaan penelitian dan menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari informan dan membangun kepercayaan subjek. Pada tahapan ini

peneliti ikut dalam forum pertemuan antara mahasiswa penerima program Banyuwangi Cerdas dengan pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai bentuk pengawasaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

## 2. Ketekunan pengamatan

Menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Pada tahap ini peneliti mengamati apakah ada ketidak selarasan antara data yang diperoleh dari informan satu dengan informan lainnya.

## 3. Triangulasi

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi sendiri ada empat macam yaitu triangulasi dengan memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori.

## 4. Pengecekan sejawat

Tehnik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud yaitu pertama, untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti. Para peserta dalam diskusi sebaiknya rekan sejawat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang dipersoalkan, terutama tentang isi dan metodologinya. Peserta sebaiknya bukan orang yang lebih muda, jauh lebih tua, mereka yang mempunyai kewenangan, kekuasaan dan orang yang disegani hal ini untuk menjaga suasana diskusi. Beritahu peserta bahwa peranan mereka lebih merupakan pengkritik yang tajam daripada pengagum hasil penelitian. Usahakan agar baik peneliti maupun peserta membuat catatan yang bermanfaat bagi peneliti untuk keperluan auditing

nantinya dan bermanfaat bagi peneliti untuk melihat dan membandingkan posisinya. Pada tahap ini peneliti berdiskusi dengan teman-teman satu angkatan baik yang sudah selesai menempuh skripsi maupun sedang mengerjakan skripsi untuk mendapatkan masukan-masukan demi kesempurnaan karya tulis ini. Peneliti berdiskusi dengan Nuraida Muji, Priska Puspita, Hanifa, Dia Malakaraya, Ferio pristiawaan Ekananda dan Nanda Eka Merdeka.

#### 5. Kecukupan referensial

Sebagai alat menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Misalnya saja alat perekam dapat dijadikan pembanding dari hasil yang diperoleh dengan kritik yang telah terkumpul. Pada tahap ini peneliti juga menguji dengan data rekaman yang diperoleh pada saat sedang berlangsungnya proses wawancara dengan berbagai macam narasumber.

#### 6. Pengecekan anggota

Tehnik dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analitis, penafsiran dan kesimpulan. Karena penelitian ini merupakan penelitian individu, peneliti tidak menggunakan tahap ini dalam teknik pengujian keabsahan data.

#### 7. Uraian rinci

Usaha membangun keteralihan dalam penelitian kualitatif jelas sangat berbeda dengan non kualitatif dengan validitas eksternalnya. Dalam penelitian kualitatif hal itu dilakukan dengan cara uraian rinci (thick description). Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan setelah dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Jelas laporan itu harus mengacu pada fokus penelitian. Uraiannya harus mengungkapkan secara khusus sekali segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar ia dapat memahami penemuan-penemuan yang diperoleh.

#### 8. Auditing

Proses audit atau *auditing* merupakan langkah terakhir dalam proses pengujian keabsahan data. Pada proses ini, peneliti akan melakukan sekian tahapan guna memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya. Menurut Halpern sebagaimana dikutip oleh Moleong (2012:339), proses *auditing* terdiri dari pra-entri, penetapan hal-hal yang dapat diaudit, kesepakatan formal, dan penentuan keabsahan data. proses pertama yang disebut sebagai pra-entri merupakan proses awal dalam merumuskan kesepakatan audisi atas data yang diperoleh. Dalam proses ini, seorang peneliti yang kemudian dikenal dengan istilah auditi akan menjelaskan secara singkat terkait maksud, tujuan, proses, dan hasil temuannya.

Langkah selanjutnya meliputi penetapan hal-hal yang dapat diaudit. Pada tahap ini, auditi akan menyediakan segala macam pencatatan dan bahan penelitian untuk konsultasi lebih lanjut. Kemudian pada langkah ketiga, adanya prose kesepakatan formal antara auditor dengan auditi. Pada tahap ini, auditor dan auditi akan menghasilkan kesepakatan tertulis tentang apa yang telah dicapai oleh auditor dalam melakukan audit hasil penelitian auditi. Jika ketiga langkah tersebut sudah dijalankan, maka langkah terakhir adalah penentuan keabsahan. Dalam hal ini, penentuan keabsahan menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian terhadap hasil audit yang dijalankan sekaligus memberikan penilaian atas keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian.